

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini berjalan sangat cepat, dimana dunia dapat terhubung melalui jaringan komputer yang dapat berinteraksi dan tukar menukar informasi. Setiap orang yang hidup saat ini ingin terus mengupdate dan mengikuti perkembangan teknologi, beragam inovasi terus menerus di bidang pengembangan aplikasi berbasis *web* dan juga bidang lainnya, sehingga tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi ini meningkat dengan tajam dengan munculnya berbagai sistem sebagai pendukungnya.

Seperti yang telah di bahas di atas, kegunaan teknologi informasi di dalam sebuah sistem pelayanan informasi adalah untuk menyediakan informasi dengan cepat dan tepat, serta memberi kemudahan pada instansi terkait untuk mengakses sistem informasi KLHK melalui *akses internet* yang berbasis *web*.

Perjalanan Dinas merupakan hal yang lazim dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil selaku aparatur pemerintah. Perjalanan dinas memberikan manfaat untuk meningkatkan kinerja organisasi atau instansi sekaligus kinerja individu Pegawai Negeri Sipil. Namun ada indikasi (kemungkinan) penyimpangan pertanggungjawaban perjalanan dinas melalui beberapa modus, yang dapat membawa kerugian bagi negara. Pelaksanaan perjalanan dinas ternyata masih dimanfaatkan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil selaku Pelaksana Perjalanan Dinas untuk memperoleh keuntungan secara ilegal guna memperoleh tambahan penghasilan.

Kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan pertanggungjawaban perjalanan dinas, apakah dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penyimpangan pertanggungjawaban perjalanan dinas ini? Untuk mencari jawabannya dilakukan penelitian yuridis empiris, dengan penyebaran kuesioner dan wawancara hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengindikasikan modus penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan mempersingkat

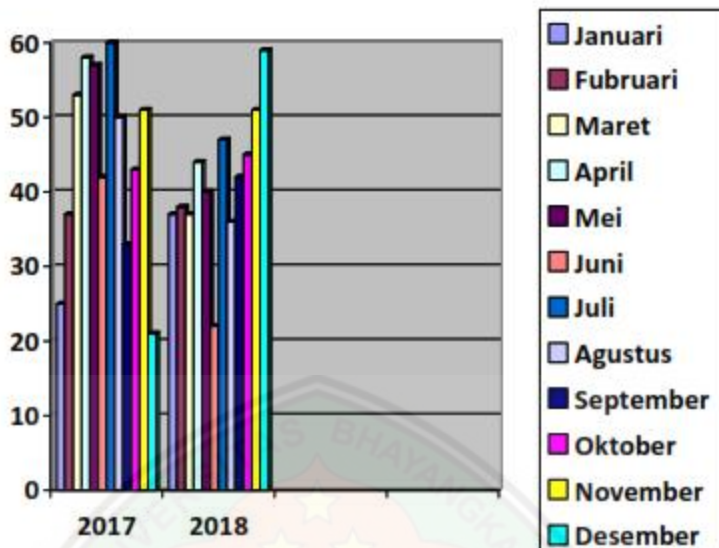
waktu perjalanan dinas, melaksanakan perjalanan dinas fiktif dan pemalsuan bukti Perjalanan Dinas, serta pengelembungan biaya Perjalanan Dinas(Mark up),penyimpangan pertanggungjawaban perjalanan dinas merupakan tindak pidana korupsi Penegakan hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan upaya preventif maupun represif dan kerugian yang dialami negara harus dilakukan Penggantian.

Berikut jumlah Surat Keluar Laporan Perjalanan Dinas Eselon II yang ditangani oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dari tahun 2017 Hingga tahun 2018 mencapai 1.028 perjalanan dinas, dengan jumlah kasus rata-rata per bulan mencapai 30 hingga 50 perjalan tiap bulannya. Tabel berikut Surat Keluar Laporan Perjalanan Dinas Eselon II, terlihat bertambah dan berkurang dari bulan ke bulan tergantung kasus yang ditangani.

**Tabel 1.1 Surat Keluar Laporan Perjalan Dinas Eselon II**

Bulan	Tahun	
	2017	2018
Januari	25	37
Febuari	37	38
Maret	53	37
April	58	44
Mei	57	40
Juni	42	22
Juli	60	47
Agustus	50	36
September	33	42
Oktober	43	45
November	51	51
Desember	21	59

**Sumber : Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**



Gambar 1.1 Grafik Surat Keluar Laporan Perjalan Dinas Eselon II

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Kementerian LHK Hingga Tahun 2018 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun	Jumlah Pegawai (SIMPEG)	Jumlah Penstun (BUP)	%
Tahun 2013	12.765 orang	455 orang	28%
Tahun 2014	14.876 orang	490 orang	30%
Tahun 2015	13.355 orang	389 orang	34%
Tahun 2016	15.434 orang	630 orang	24%
Tahun 2017	16.801 orang	528 orang	31%

Sumber : Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Diharapkan dengan adanya Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Kasus : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK)) dengan berbasis web ini maka ketika ada pengolahan data perjalanan dinas tidak perlu memerlukan waktu yang relative lama dan mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak perlu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat skripsi dengan judul ***“RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERJALANAN DINAS LINGKUP DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS WEB STUDI KASUS : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) ”***

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum adanya sistem informasi untuk pengeditan setiap kali akan melakukan perjalanan dinas, serta sulitnya mencari data setiap pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas di Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- b. Sering terjadi kesalahan pengalokasian sumber daya manusia dalam perjalanan dinas yang menyebabkan terjadinya tugas ganda masih sering terjadi.
- c. Kontrol absensi sehubungan dengan perjalanan dinas masih menemui kendala.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

***“Bagaimana Merancang Sistem Informasi Perjalanan Dinas Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berbasis Web Studi Kasus : Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK)?”***

#### 1.4 Batasan Masalah

Dalam pembuatan tugas akhir ini pembahasan masalah memiliki batasan pada permasalahan berikut:

- a. Mengoptimalkan sistem informasi pertanggung jawaban perjalanan dinas untuk pegawai direktorat penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup .
- b. Sistem informasi ini dibuat *berbasis web* agar dapat memudahkan bagi pegawai agar mengetahui informasi terbaru dari pihak pengelola.
- c. Sistem pelayanan informasi ini terbatas pada masalah Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Lampiran SPPD, Form Absensi, Nota Dinas, Kwitansi Pembayaran, Rekap SPPD, Kontrol Perjalanan Dinas.
- d. Realisasi Penyerapan Anggaran sebagai bagian dari sistem informasi direktorat penyelesaian sengketa, sistem ini mempunyai kemampuan menambah ataupun merubah data yang telah tersedia.

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Reningkatkan informasi pegawai dalam pengetahuan informasi perjalanan dinas.
- b. Untuk mempermudah pegawai dalam hal penjadwalan acara dinas dikarenakan sering terjadi keterlamabatan informasi yang tidak terjadwal dan tidak diketahui oleh pegawai.
- c. Membantu proses penyimpanan data SPPD tanpa harus takut untuk kehilangan surat ataupun rusak akibat hal yang tidak di inginkan.
- d. Mempermudah efektifitas kinerja pembuatan Surat Perintah Dinas (SPPD) dengan lebih mudah, hemat biaya, dan hemat waktu.
- e. Memudahkan manajemen perjalanan dinas SPPD, dalam hal mengurangi waktu kerja, meminimalkan kesalahan, dan manajemen personil yang lebih baik.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **A. Bagi Pegawai**

Dapat memberikan kemudahan bagi pihak pegawai agar mudah memperoleh informasi penjadwalan perjalanan dinas.

### **B. Bagi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

Dapat memberikan kemudahan bagi pihak pusat agar bisa memberikan informasi ke pegawai jika ada perjalanan dinas.

## **1.7 Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun tempat dan waktu penelitian ini dilakukan adalah :

Tempat : Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  
Gedung Mangala Wanabakti, Blok IV Lantai 4, Jl. Gatot Subroto, Senayan – Jakarta Pusat (10270)

Waktu : 10 April 2018

## **1.8 Metodologi Penelitian**

Dalam penyusunan suatu laporan memerlukan beberapa data. Penulisan dalam menyusun laporan ini memerlukan data yang tepat mengenai perusahaan secara umum dan bahasan yang singkat secara khusus. Untuk mendapatkan hasil yang objektif maka metode pengumpulan data berperan sangat penting dalam penyusunan laporan ini. Beberapa metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini antara lain:

### **a. Metode Observasi**

Observasi dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk pengumpulan data yang ditempuh dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek pengamatan di Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, sehingga dapat mengetahui situasi dan kondisinya.

### **b. Metode *Interview***

Wawancara dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pihak Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

c. **Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan mengumpulkan informasi yang bersifat teori, data dan keterangan yang diperoleh melalui buku, dokumen/arsip, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan aplikasi media sistem informasi pertanggung jawaban perjalanan dinas.

Beberapa teknik yang dilakukan dalam metode pengumpulan data yaitu terdiri dari:

a. Menganalisis permasalahan yang dihadapi serta membuat perbandingan-perbandingan sebelum maupun pembuatan program aplikasi Sistem Informasi Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas.

b. Mengumpulkan data-data pendukung secara sistematis yang diambil dari data relevan dan lengkap untuk menunjang penelitian yang sedang dilakukan, antara lain:

a. **Studi Pustaka (*Library Research*)**

Mencara dan mengumpulkan arti dan pemahaman istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi.

b. **Studi Lapangan (*Field Research*)**

Wawancara (*Interview*) merupakan pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang berhubungan secara langsung dengan alur informasi dan seluruh dokumentasi yang digunakan pada sistem informasi pertanggung jawaban perjalanan dinas.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah satu sama lainnya sehingga memiliki keterkaitan antara satu sama lain sehingga tujuan dari penulisan ini dapat tercapai, maka diperlukan adanya sistematika.

Sistematika penulisan ini terbagi atas lima bagian di mana setiap bab terbagi atas sub bab dan ada pun pembagian bab tersebut sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penulisan, metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data, metode pengembangan sistem serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan-landasan teori yang berkaitan dengan topik pembahasan, diantaranya yang berhubungan dengan Android serta *software* pendukung (*tools system*) yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara umum dan singkat tentang profil organisasi atau sistem yang digunakan dalam laporan tugas akhir, tinjauan perusahaan, prosedur sistem yang berjalan pada Direktorat Penyelesaian Sengketa (KLHK), serta hasil analisis yang didapat dari penelitian yang dilakukan, gambaran dari aplikasi Sistem Informasi Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas permasalahan yang dihadapi dan usulan pemecahan masalah.

## **BAB IV PERANCANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI**

Pada bab ini berisikan tentang implementasi dan evaluasi terhadap aplikasi Sistem Informasi Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas yang telah dirancang.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan terhadap sistem yang dibuat dan saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem lebih lanjut dimasa mendatang.